



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-47/KP.01.00/K1/01/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Instruksi

Jakarta, 25 Januari 2025

Kepada Yth.

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Se-Indonesia;**
2. **Ketua Panwaslih Aceh;**
3. **Ketua Panwaslih Provinsi Aceh.**

di-

Tempat

Dengan telah selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024, disampaikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi Se-Indonesia, Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Provinsi Aceh untuk membuat laporan yang berisikan materi sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Rekrutmen Pengawas adhoc Pemilu dan Pemilihan.
2. Laporan Pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU Pemilu dan Pemilihan.
3. Laporan Pengawasan Logistik pada Pemilu dan Pemilihan.
4. Laporan pembinaan SDM pengawas pemilu dan pemilihan.
5. Laporan Implementasi Program Prioritas SDMOD (Penanaman Pohon Integritas, Mentalitas, dan Spiritualitas).
6. Laporan komprehensif Divisi SDMO dan Diklat.
7. Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pemilu dan Pemilihan.
8. Laporan Pelatihan Saksi pada Pemilu dan Pemilihan.
9. Penyerahan Buku SDMO-Diklat.
10. Laporan Pengelolaan Keuangan Pemilu dan Pemilihan.

Pembuatan laporan tersebut sesuai dengan format yang telah disampaikan sebelumnya dan dikumpulkan kepada Bawaslu dalam bentuk *Hardcopy* serta *Softcopy* menggunakan media *flashdisk* atau media penyimpanan lainnya apabila kapasitas *flashdisk* tidak terpenuhi. Disampaikan juga kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh untuk memerintahkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota turut serta membuat dan menyerahkan kepada Bawaslu pada tanggal sesuai dengan lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

KETUA,



Rahmat Bagja

Sistematika Penulisan Laporan

LAPORAN
PELAKSANAAN _____
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Uraian singkat mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. RUANG LINGKUP

Memuat ruang lingkup laporan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Uraian singkat yang meliputi maksud dan tujuan penyusunan laporan.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Memuat gambaran singkat terkait pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

B. GAMBARAN UMUM

Gambaran umum wilayah/demografi dari masing-masing wilayah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang melaksanakan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah masing-masing, jumlah peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di wilayah masing-masing, dan sebagainya.

BAB III
ISI LAPORAN

A. PELAKSANAAN PROGRAM

1. Pelaksanaan

Uraikan secara detail pelaksanaan program yang dilakukan. Terhadap pelaksanaan kegiatan pembentukan badan adhoc dan peningkatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan maka uraikan secara detail tiap tahapan pelaksanaannya seperti jumlah peserta yang mengikuti dan hasil dari pelaksanaan.

2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN/APBD

- Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas
Penjelasan singkat kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas
- Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran
Disertakan hasil identifikasi program dan kegiatan yang tidak didukung anggaran
- Besaran serapan anggaran

Menyebutkan besaran serapan dan disusun dalam bentuk tabel dibawah:

Besaran Anggaran dan Serapan

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan

Sumber:.....

Beri penjelasan secara singkat terkait tabel tersebut diatas.

3. **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN**

- a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran
Uraikan dengan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Hambatan dan Tantangan).
- b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas
Uraikan dengan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Hambatan dan Tantangan).
- c. Rekomendasi
Uraian dapat berupa revisi Permendagri atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal-hal terkait pada point (a) dan (b) diatas atau berupa hal-hal strategis lainnya yang didukung dengan data yang jelas.

B. **TINDAK LANJUT PELAKSANAAN**

Uraikan secara detail tindak lanjut dari pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan. Terhadap pelaksanaan pengawasan maka uraikan secara detail terkait temuan dan laporan hasil pengawasannya, serta tindak lanjut dari laporan hasil pengawasan tersebut.

BAB IV
EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. **EVALUASI**

Uraian berupa identifikasi masalah dengan menggunakan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Hambatan dan Tantangan) secara umum terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

B. **REKOMENDASI**

Uraian rekomendasi dari hasil evaluasi poin (1) secara umum terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

CATATAN: SISTEMATIKA PELAPORAN DAPAT MENYESUAIKAN SESUAI DENGAN LAPORAN BIRO ATAU UNIT PENGAMPU KEGIATAN

Laporan Pelaksanaan Tugas Divisi SDMO dan Diklat

Nama Laporan	Waktu Pelaksanaan	Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota	Unit Kerja Pengampu
1. Laporan Pelaksanaan Rekrutmen Pengawas adhoc Pemilu dan Pemilihan 2. Laporan Pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU Pemilu dan Pemilihan 3. Laporan Pengawasan Logistik pada Pemilu dan Pemilihan 4. Laporan pembinaan SDM pengawas pemilu dan pemilihan 5. Laporan Implementasi Program Prioritas SDMOD (Penanaman Pohon Integritas, Mentalitas, dan Spiritualitas) 6. Laporan komprehensif Divisi SDMO dan Diklat	3-5 Februari 2025	1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8. Lampung 9. Kepulauan Riau 10. Kepulauan Bangka Belitung 11. DI Yogyakarta 12. Jawa Timur 13. Banten 14. Bali 15. Nusa Tenggara Barat 16. Nusa Tenggara Timur	1. Inspektorat 2. Biro SDM dan Umum 3. Biro Fasilitasi Pengawasan
	10-12 Februari 2025	1. DK Jakarta 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Tengah 6. Kalimantan Selatan 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Sulawesi Utara 10. Sulawesi Tengah	

Nama Laporan	Waktu Pelaksanaan	Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota	Unit Kerja Pengampu
		11. Sulawesi Selatan 12. Sulawesi Tenggara 13. Gorontalo 14. Sulawesi Barat 15. Maluku 16. Maluku Utara 17. Papua 18. Papua Barat 19. Papua Selatan 20. Papua Tengah 21. Papua Pegunungan 22. Papua Barat Daya	
1. Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pemilu dan Pemilihan 2. Laporan Pelatihan Saksi pada Pemilu dan Pemilihan 3. Penyerahan Buku SDMO-Diklat	13-15 Februari 2025	1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8. Lampung 9. Kepulauan Riau 10. Kepulauan Bangka Belitung 11. DI Yogyakarta 12. Jawa Timur 13. Banten 14. Bali 15. Nusa Tenggara Barat 16. Nusa Tenggara Timur	Puslitbangdiklat
	17-19 Februari	1. DK Jakarta 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Tengah 6. Kalimantan Selatan	

Nama Laporan	Waktu Pelaksanaan	Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota	Unit Kerja Pengampu
		7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Sulawesi Utara 10. Sulawesi Tengah 11. Sulawesi Selatan 12. Sulawesi Tenggara 13. Gorontalo 14. Sulawesi Barat 15. Maluku 16. Maluku Utara 17. Papua 18. Papua Barat 19. Papua Selatan 20. Papua Tengah 21. Papua Pegunungan 22. Papua Barat Daya	
Laporan Pengelolaan Keuangan Pemilu dan Pemilihan	24-26 Februari 2025	1. DK Jakarta 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Tengah 6. Kalimantan Selatan 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Sulawesi Utara 10. Sulawesi Tengah 11. Sulawesi Selatan 12. Sulawesi Tenggara 13. Gorontalo 14. Sulawesi Barat 15. Maluku 16. Maluku Utara 17. Papua 18. Papua Barat	Inspektorat Biro Keuangan dan BMN

Nama Laporan	Waktu Pelaksanaan	Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota	Unit Kerja Pengampu
		19. Papua Selatan 20. Papua Tengah 21. Papua Pegunungan 22. Papua Barat Daya	
	26-28 Februari 2025	1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8. Lampung 9. Kepulauan Riau 10. Kepulauan Bangka Belitung 11. DI Yogyakarta 12. Jawa Timur 13. Banten 14. Bali 15. Nusa Tenggara Barat 16. Nusa Tenggara Timur	